



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP)

2020



PEMERINTAH  
KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Telp.(0334) 8780990 Fax.(0334) 887461 - 885534  
e-Mail : [kominfo@lumajangkab.go.id](mailto:kominfo@lumajangkab.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya semata Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi laporan ini menguraikan tentang gambaran informasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya mencakup gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, keberhasilan maupun tidak keberhasilan, inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selaku Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018 – 2023.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yang

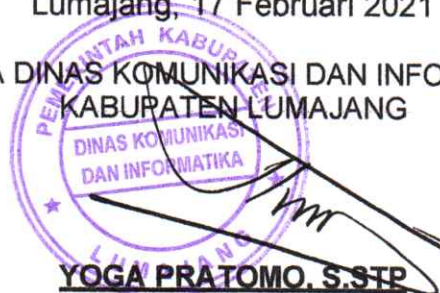
telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2020, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk tahun 2020 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang serta semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Lumajang, 17 Februari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG



**YOGA PRATOMO, S.STP**

Pembina Tk I

NIP. 197809 199802 1 001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini disusun. LKJIP ini menyampaikan capaian kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selama tahun 2020 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKJIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKJIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari keseluruhan bidang tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, tentunya tidak hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan namun juga dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum dalam rangka mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	3
B. Gambaran Umum dan Tupoksi	3
1. Kondisi Kepegawaian	4
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
1. Tujuan	8
2. Sasaran	8
3. Strategi dan Kebijakan	9
4. Program dan Kegiatan	9
5. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran	10
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	11
B. Perjanjian Kinerja	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	17

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

B.	Akuntabilitas Keuangan	39
C.	Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	58
IV.	PENUTUP	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

##### **1. LATAR BELAKANG**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (*digital divide*) pada sebagian kelompok masyarakat.

Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur,pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.

Seiring dengan hal di atas, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi *e-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif

dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna (*user*). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya *e-government* merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap.

Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, dapat menjadi agen manajemen informasi sekaligus sebagai *public relation* seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat.

Sebagai bentuk tanggung jawab keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2020 sesuai dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2020, sehingga LKJIP ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah sebagai penjabaran Misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terwujud



dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

### **3. RUANG LINGKUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dibatasi pada Penyajian Kinerja yang terkait dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

## **B. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Lumajang yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang pesandian yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 66 orang yang terdiri dari 25 orang PNS dan 41 orang Tenaga Honorer.

Berikut kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

## 1. KONDISI KEPEGAWAIAN

Formasi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	Tenaga Honorer		
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0
3	SMA/SMK	7	16	23	35 %
4	D3	5	2	7	11 %
5	S1	11	22	33	50 %
6	S2	2	1	3	5 %
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan informatika memiliki pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan Sarjana (S1) yaitu 50% (33 orang). Sedangkan untuk jenjang SMA/ SMK sebanyak 35% (23 orang), SMP sebesar 5% (0 orang) dan D3 sebesar 11% (7 orang). Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berdasarkan Pangkat/ Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Golongan**

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	24%
3	Golongan III	17	68%
4	Golongan IV	2	8%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebagian besar Golongan Ruang III yaitu sebanyak 68% (17 orang),

Golongan II yaitu sebanyak 24% (6 orang) dan Golongan IV yaitu sebanyak 8% (2 orang) dan golongan I sebanyak 0 % (0 orang). Disamping pendidikan formal, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang**  
**Tahun 2020 yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural**

No	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1	I	0
2	II	0
3	III	1
4	IV	6
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sedangkan jika dilihat berdasarkan eselon maka ditunjukkan oleh Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang**  
**Tahun 2020 Berdasarkan Eselon**

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	IIb	1
2	IIIa	1
3	IIIb	3
4	IVa	11
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

**Tabel 1.5**  
**Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi**

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>GOLONGAN TANAH</b>	<b>0</b>			
	01.01.	- Tanah	0	-	-	-
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>691</b>			
	02.02.	- Alat-Alat Besar	2	2	-	-
	02.03.	- Alat-Alat Angkutan	17	17	-	-
	02.04.	- Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1	1	-	-
	02.05.	- Alat-Alat Pertanian	0	-	-	-
	02.06.	- Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	621	621	-	-
	02.07.	- Alat-Alat Studio & Komunikasi	50	50	-	-
	02.08.	- Alat-Alat Kedokteran	0	-	-	-
	02.09.	- Alat-Alat Laboratorium	0	-	-	-
	02.10.	- Alat-Alat Persenjataan / Keamanan	0	-	-	-
<b>03</b>	<b>03</b>	<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	03.11.	- Bangunan Gedung	9	9	-	-
	03.12.	- Monumen	0	-	-	-
<b>04</b>	<b>04</b>	<b>GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	04.13.	- Jalan Dan Jembatan	0	-	-	-
	04.14.	- Bangunan Air / Irigasi	0	-	-	-
	04.15.	- Instalasi	0	-	-	-
	04.16.	- Jaringan	0	-	-	-
<b>05</b>	<b>05</b>	<b>GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0</b>			
	05.17.	- Buku Dan Perpustakaan	0	-	-	-
	05.18.	- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	0	-	-	-
	05.19.	- Hewan, Ternak Dan Tanaman	0	-	-	-
<b>06</b>	<b>06</b>	<b>GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang serta dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

**a. Tugas**

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

**b. Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019. Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

##### 1. Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

##### 2. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK yang terpadu.

Indikator sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK yang terpadu” adalah Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu, yang dihitung dengan formula Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu dibagi Jumlah PD yang ada dikali 100%.

- b) Meningkatnya Implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

Indikator sasaran “Meningkatnya Implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik” adalah Persentase badan publik yang menerapkan standar layanan informasi. yang dihitung dengan formula Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik dibagi jumlah badan publik dikali 100%.

##### 3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
5. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
8. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah
9. Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

#### 4. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pembangunan/ pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Aparatur
  - b. Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
  - e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
  - a. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  - b. Kerjasama Informasi dengan Media Massa

- c. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik
  5. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
    - a. Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik
    - b. Pengelolaan Media Publik
  6. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
    - a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    - b. Pengelolaan dan Pengembangan Informatika
    - c. Pemberdayaan Informatika
  7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
    - a. Layanan Data dan Statistik
  8. Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
    - a. Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian
  9. Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
    - a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
- Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dicapai melalui kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas administrasi, sarana dan prasarana perkantoran serta pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
  2. Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK.
  3. Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui Pengelolaan Media Publik dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Sosial
  4. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik
  5. Meningkatnya jumlah data yang dimutakhirkan
  6. Meningkatnya Pengamanan informasi di Bidang Persandian
  7. Meningkatnya jumlah saluran penyampaian Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai



## 6. Rencana Kerja Tahunan

1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</b>	893.706.500
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	893.706.500
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	493.471.680
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana yang tersedia/direhab	266.361.680
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	227.110.000
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	12.568.400
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan lakip yang disusun	4.108.400
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	480.000

	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2.190.000
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM	951.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4.839.000
4	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa</b>	<b>Meningkatnya Persentase diseminasi informasi publik</b>	2.959.488.600
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah konten informasi yang disebarluaskan	1.646.977.600
	Penyelenggaraan kehumasan daerah	Jumlah konten informasi yang tersedia	553.308.000
	Pengelolaan media publik	Jumlah media publik yang dikelola	759.203.000
5	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat</b>	274.942.500
	Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog	145.954.500
	Penyelenggaraan informasi publik	jumlah media publik yang dikelola	129.680.000
6	<b>Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi</b>	42.900.000

		<b>dalam komunikasi perangkat daerah</b>	
	Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	42.900.000
<b>7</b>	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>	<b>Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.</b>	<b>1.185.057.200</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Informatika	Jumlah terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu	805.400.200
	Pemberdayaan Informatika	Jumlah Pengguna SPBE yang dibina	379.657.000
<b>8</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>	<b>259.724.000</b>
	Layanan Data dan Statistik	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi kepada masyarakat	259.724.000
<b>9</b>	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Persentase serapan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)</b>	<b>693.606.250</b>
	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada	Jumlah saluran penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di	693.606.250

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan	Bidang Cukai	
--	---	--------------	--

## B. PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	97%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	70%
4.	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	70%
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	80%
6.	Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Persentase diseminasi informasi publik	100%

7.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase serapan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	98%
8.	Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	65%
9.	Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	70%

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggungjawaban atas suatu kewajiban, sedangkan Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah **LKJIP**.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang 2020 secara umum dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian merupakan hasil dari suatu Penilaian yang sistematis dan didasarkan pada *Kelompok Indikator Kegiatan* yang berupa indikator masukan (**Input**), Indikator Keluaran (**Output**), Indikator Hasil (**Outcome**), Manfaat (**Benefit**), dan Dampak (**Impact**). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk Kuantitatif dan Kualitatif berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif tersebut dilakukan agar lebih terukur dan mudah dievaluasi pada setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur dengan benar pencapaiannya. Analisis Capaian Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja dengan tingkat capaian berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditargetkan secara menyeluruh. Capaian Kinerja diukur dengan mengukur capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan dengan akuntabilitas keuangan dari program dan kegiatan tersebut dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran. Pengukuran tingkat capaian ditetapkan menggunakan skala pengukuran dengan nilai skala ordinal.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program dan kegiatan tersebut, berikut ini gambaran kategori capaian sasaran menggunakan nilai skala ordinal sebagaimana tabel di bawah ini :

NO. URUT	NILAI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	≤ 55%	Kurang Berhasil
2.	56% s/d 70%	Cukup Berhasil
3.	71% s/d 85%	Berhasil
4.	≥ 86%	Sangat Berhasil

## 2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja merupakan Hasil Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja, baik indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 digambarkan dengan Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana komitmen kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disinggung pada Bab II di atas. Gambaran ketercapaian Indikator Kinerja dapat dijelaskan sebagaimana tahapan proses berikut :



**MISI 3 :**

**“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.”**

**TUJUAN 1 :**

**“Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).”**

**INDIKATOR 1 :**

**“Persentase penerapan SPBE oleh PD.”**

Berdasarkan hasil rumusan Misi dan Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut di atas dapat dijabarkan lebih lanjut Tujuan dari Perangkat Daerah (PD) yang akan menjadi Sasaran Strategis dari Pemerintah Daerah. Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu;
2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

Dari Sasaran Perangkat Daerah (PD) dirumuskan pula indikator Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu
2. Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik

Capaian Kinerja dari Sasaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Indikator Kinerja Sasaran ditinjau dari Indikator Sasaran Strategis yang ingin dicapai. Gambaran Capaian Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100\% \implies \frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik}}{\text{Jumlah Badan Publik}} \times 100\% \implies \frac{71}{71} \times 100\% = 100\%$$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	80%	100%	<b>Sangat Berhasil</b>
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	83%	100%	<b>Sangat Berhasil</b>

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis tersebut di atas dapat dicapai oleh Indikator Kinerja dengan rumusan dari Indikator tersebut yaitu Terlaksananya fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan KMIP, Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Kominfo, Terlaksananya Pengembangan Website, Terlaksananya Pengelolaan Radio Suara Lumajang, dan Terlaksananya Forum PPID.

Tingkat Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum capaian indikator mengalami peningkatan. Dari 2 (dua) indikator semuanya mencapai target yang diharapkan pada Indikator yang mendukung misi ketiga, yaitu mewujudkan Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi, capaian target pada tahun 2019 dan 2020 sudah mencapai target

yang ditetapkan. Gambaran Realisasi Indikator Kinerja Strategis dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	80%	100%	100%
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	83%	100%	100%

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dipenuhi oleh tercapainya program-program yang dilaksanakan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas. Dalam upaya mewujudkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran dari Sasaran Strategis tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran.

a) Perbandingan Target dan realisasi indikator sasaran pada sasaran strategis ketiga

SASARAN STRATEGIS	IND. KINERJA	PERBANDINGAN TARGET REALISASI CAPAIAN TAHUN 2019			PERBANDINGAN TARGET REALISASI CAPAIAN TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2				3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	70%	71%	TERCAPAI	80%	100%	TERCAPAI
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	80%	81%	TERCAPAI	83%	100%	TERCAPAI

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang secara keseluruhan indikator kinerja sasaran sudah tercapai, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja rata-rata hampir mencapai 100%. Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2020 memenuhi target yang ada dalam Rencana Strategis dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dilihat capaian kinerja tahun 2020, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami peningkatan pada seluruh indikator. Secara umum rata-rata capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari 71 % pada tahun 2019 meningkat menjadi 100 % pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 29 %. Meningkatnya target capaian pada indikator sasaran “Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)” selaras dengan tercapainya target capaian pada RPJMD Provinsi yaitu Meningkatnya transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selanjutnya, dengan meningkatnya target capaian kinerja pada indikator sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik” pada rencana Strategis Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 tentunya juga berimplikasi terhadap peningkatan target capaian pada sasaran RPJMN yaitu Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

Peningkatan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang bisa tercapai karena terlaksananya komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, demokratis, dan terpercaya. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah dengan menerapkan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya penerapan *e-government*, pemerintah daerah dituntut untuk semakin cepat dalam penyaluran informasi pada Masyarakat. Dalam hal ini seluruh PD diuntut untuk selalu memberikan informasi terbaru karena apabila dilihat secara fakta, ada beberapa informasi yang tidak tersalurkan ke masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja yang berimplikasi dengan peningkatan capaian sasaran strategis yaitu dengan diperlukan penyediaan anggaran yang cukup untuk menyediakan sarana dan prasarana TIK yang memadai dan memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Dukungan dari pimpinan juga sangat mempengaruhi peningkatan pelaksanaan program sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program sehingga para pelaksana program kegiatan bisa merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dengan baik.

**b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)			% TINGKAT EFISIENSI	KET.
			PAGU PAK (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Penyelegaraan Pemerintahan berbasis TIK yang Terpadu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	893.706.500,00	834.841.640,00	58.864.860,00	7	EFISIEN
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	493.471.680,00	481.794.434,00	11.677.246,00	2	EFISIEN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	12.568.400,00	12.433.225,00	135.175,00	1	EFISIEN
		Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.185.057.200,00	1.123.163.631,00	61.893.569,00	5	EFISIEN
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	259.724.000,00	256.926.600,00	2.797.400,00	1	EFISIEN
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Opleh	Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa	2.959.488.600,00	2.790.248.604,00	169.239.996,00	6	EFISIEN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	Badan Publik	Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	274.942.500,00	240.117.390,00	34.825.110,00	13	EFISIEN
		Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	42.900.000,00	36.980.901,00	5.919.099,00	14	EFISIEN
		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	693.606.250,00	638.325.000,00	55.281.250,00	8	EFISIEN

Hasil Capaian Pengukuran Efisiensi Anggaran dari Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK yang Terpadu dan Meningkatnya Keterbukaan Informasi Oleh Badan Publik secara keseluruhan sudah mencapai efisiensi yang cukup baik. Berdasarkan Tabel diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian efisien yang cukup baik dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat Program yang menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi, yaitu Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mengalami penurunan setiap tahunnya akibat banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun sementara disisi lainnya tidak ada penerimaan pegawai baru. Namun demikian dengan jumlah personil yang ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia juga dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam

pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta untuk melaksanakan Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

**c. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2020 melaksanakan 19 kegiatan yang tercakup dalam 9 program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pembangunan/ pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Aparatur
  - b. Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
  - e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
  - a. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  - b. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
  - c. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik
5. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
  - a. Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik
  - b. Pengelolaan Media Publik
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
  - a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik



- b. Pengelolaan dan Pengembangan Informatika
- c. Pemberdayaan Informatika
- 7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
  - a. Layanan Data dan Statistik
- 8. Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
  - a. Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian
- 9. Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
  - a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

**d. Perbandingan target dan Realisasi masing-masing Program yang disajikan**

Seluruh program kegiatan diatas ditujukan untuk mencapai target dari 2 indikator sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2020 dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang seluruh indikator realisasinya mencapai target. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sehingga masih ada satu indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait pandemi covid-19

sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah sehingga harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.

**e. Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

Pengumpulan Data dan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan secara optimal pada tahun 2020. Selanjutnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Capaian pada tahun 2020 secara berkala dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan seluruh bidang-bidang yang ada.

**Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 pada Sekretariat**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran		Realisasi		Capaian		Efisiensi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</b>	97%	893.706.500	92%	834.841.640	95%	93,41%	1,43%
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang disediakan	9 Jenis	893.706.500	9 Jenis	834.841.640	100%	93,41%	6,59%
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	98%	493.471.680	98%	481.794.434	100%	97,63%	2,37%
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana yang tersedia/direhab	10 Jenis	266.361.680	10 Jenis	264.426.000	100%	99,27%	0,73%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	8 Jenis	227.110.000	8 Jenis	217.368.434	100%	95,71%	4,29%
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	70%	12.568.400	70%	12.433.225	100%	98,92%	1,08%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan lakip yang disusun	1 Jenis	4.108.400	1 Jenis	4.022.375	100%	97,91%	2,09%

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	1 Laporan	480.000	1 Laporan	473.500	100%	98,65%	1,35%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Jenis	2.190.000	1 Jenis	2.163.800	100%	98,80%	1,20%
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM	4 Laporan	951.000	4 Laporan	945.850	100%	99,46%	0,54%
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	3 Laporan	4.839.000	3 Laporan	4.827.700	100%	99,77%	0,23%
<b>JUMLAH</b>			<b>2.799.493.160</b>		<b>2.658.138.598</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>2%</b>

## Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 untuk seluruh bidang

NO	SASARAN PROGRAM	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2020		Realisasi		Capaian		EFISIENSI
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	65%	290.967.500,00	64%	240.117.390	99%	83%	16%
		Penyelenggaraan Informasi Publik	Jumlah forum PPID yang dibina	122 PPID	131.817.500	122 PPID	107.454.859	100%	82%	18%
		Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah KIM yang memiliki blog	41 KIM	159.150.000	41 KIM	132.662.531	100%	83%	17%
		<b>PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	70%	50.100.000	70%	36.980.901	100%	74%	26%
		Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	55 PD	50.100.000	52 PD	36.980.901	95%	74%	21%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

		<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	<b>Persentase serapan alokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)</b>	<b>98%</b>	<b>693.606.250</b>	<b>92%</b>	<b>638.325.000</b>	<b>94%</b>	<b>92%</b>	2%
		Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan	Jumlah saluran penyampaian ketentuan perundang-undangan di Bidang Cukai	4 Saluran penyampaian informasi	693.606.250	4 saluran penyampaian informasi (1.Sosialisasi 2. Media Massa,3. Media Luar ruang, 4. Bahan Cetakan)	638.325.000	<b>100%</b>	<b>92%</b>	8%
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>Persentase diseminasi informasi publik</b>	<b>100%</b>	<b>2.989.652.000</b>	<b>50%</b>	<b>1.026.527.540</b>	<b>50%</b>	<b>34%</b>	16%
		Penyelenggaraan kehumasan daerah	Jumlah konten berita yang dipublikasikan	405 Konten	562.768.000	386 konten	506.405.697	95%	<b>90%</b>	5%
		Pengelolaan Media Publik	jumlah media publik yang dikelola	6 Media Publik	619.588.000	4 media publik	732.108.107	67%	<b>118%</b>	-51%
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah konten informasi yang disebarluaskan	405 Konten	1.807.296.000	376 konten	1.551.734.800	93%	<b>86%</b>	7%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)</b>	<b>Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.</b>	<b>80%</b>	<b>1.117.057.200</b>	<b>80%</b>	<b>1.123.163.631</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>	-1%
		Pengelolaan dan Pengembangan Informatika	Jumlah terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu	35 website	737.400.200	35 website	759.389.551	<b>100%</b>	<b>103%</b>	-3%
		Pemberdayaan Informatika	Jumlah Pengguna SPBE yang dibina	350 Orang	379.657.000	440 orang	363.774.080	<b>126%</b>	<b>96%</b>	30%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH</b>	<b>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>	<b>1 Sistem</b>	<b>347.724.000</b>	<b>1 sistem</b>	<b>256.926.600</b>	<b>100%</b>	<b>74%</b>	<b>26%</b>
		Layanan Data dan Statistik	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi	21 Data	347.724.000	21 Bidang Data	256.926.600	<b>100%</b>	<b>74%</b>	<b>26%</b>
		<b><u>Capaian Rata-rata</u></b>						<b>95%</b>	<b>85%</b>	



Gambar 1. Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Kinerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Tingkat Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang ditunjukkan pada tabel diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata seluruh indikator sebesar 95%. Dari 9 Program hanya ada satu Program yang targetnya tidak tercapai yaitu Program Pengelolaan Informasi Dan Media Massa dengan sasaran perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi dimana dari target yang direncanakan sebesar 100% hanya tercapai sebesar 50 %. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa memiliki capaian yang rendah dikarenakan oleh beberapa faktor yakni faktor teknis seperti kerusakan pada beberapa media informasi elektronik seperti videotron sehingga kegiatan publikasi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Faktor *Refocusing* anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pandemi *covid-19* sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkaibat terhadap upaya pencapaian kinerja Program tersebut.

Beberapa program juga memiliki persentase efisiensi yang besar seperti Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah dan Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa *Refocusing* anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pandemi covid-19 sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Program tersebut. Pengumpulan data kinerja telah didukung dengan penetapan mekanisme/SOP namun belum dilaksanakan secara optimal. Monitoring atas capaian kinerja sudah dilakukan dengan menyertakan data pengukuran kinerja dan dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2020 yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang (Gambar. 1).

### **c) Akuntabilitas Kinerja Lainnya**

Pada bagian ini diuraikan inovasi dan Prestasi yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai beberapa inovasi dan prestasi yaitu:

#### **Inovasi :**

##### **1. LAPOR LUMAJANG ON AIR**

Setelah sukses menggunakan saluran laporan atau keluhan warga melalui Grup Facebook Lapor Lumajang, kini Dinas Kominfo akan merilis satu inovasi lagi yang berkaitan dengan penyerapan opini dan aspirasi publik. Inovasi baru ini bernama Lapor Lumajang On Air. Nama inovasi ini terbentuk dari gabungan dua

frasa yaitu frasa Lapor Lumajang dan frasa On Air. Frasa Lapor Lumajang merujuk kepada saluran lapor yang sudah dimiliki sebelumnya yang menggunakan platform Facebook Group. Dalam grup ini warga melapor dengan cara menuliskan laporannya di dinding grup Lapor Lumajang untuk kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Frasa On Air merujuk kepada kegiatan siaran di udara melalui stasiun radio yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Kominfo yaitu LPPL RSL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang). Sebagai radio yang melakukan siaran setiap hari, RSL sangat mungkin untuk menyerap opini publik dalam bentuk apapun misalnya laporan atau keluhan.

LAPOR LUMAJANG ON AIR merupakan gabungan dari kedua fasilitas pelaporan publik ini. Untuk merealisasikan program ini perlu ada kesepakatan dari dua bidang yang ada di Dinas Kominfo yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Bidang Humas dan Kemitraan Media Massa (HKMM). Setiap laporan yang masuk dalam FB Grup Lapor Lumajang akan menjadi feed (umpan) bagi penyiar radio untuk dibacakan dan diperdengarkan kepada pemirsa RSL. Bila memungkinkan, penyiar radio akan langsung menghubungi pejabat yang berwenang untuk memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut. Semua rekaman tanggapan akan disimpan dan di-*publish* di website [www.laporlumajang.com](http://www.laporlumajang.com) untuk dibaca masyarakat. LAPOR LUMAJANG ON AIR bertujuan untuk mempercepat proses tanggapan dari sebuah laporan agar masyarakat pelapor segera mendapatkan solusi atas suatu permasalahan. Selain itu, jangkauan dari laporan ini akan menjadi lebih luas karena segmentasi pendengar RSL bisa berbeda dengan segmentasi pembaca FB Grup Lapor Lumajang

## **2. SIOPD POPULIS (WEBSITE SATU DATA)**

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/ kejadian/ kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari kondisi data statistik sektoral karena pada dasarnya data sangat diperlukan sebagai acuan dalam pengambilan suatu kebijakan guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu data statistik sektoral harus berkualitas karena memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Selain itu, untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, perlu



didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan dalam memperoleh data dari dan antar instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.

Satu Data Kabupaten Lumajang adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data. Sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Lumajang. Dalam rangka mewujudkan Satu Data Kabupaten Lumajang diperlukan system yang dapat mengintegrasikan seluruh data sesuai bidang data dari perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang dan instansi eksternal (provinsi/pusat) terkait yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Lumajang. Berikut beberapa capture Website Satu Data Lumajang dalam tampilan browser PC dan dalam tampilan Android Lumajang Bersahabat.

### **3. ODOM (ONE DAY ONE NEWS AND MORE)**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mempunyai inovasi untuk meningkatkan produksi pemberitaan terkait program dan kebijakan pemerintah kepada publik, pelayanan publik dan partisipasi publik dalam membangun daerah yang dipublikasikan melalui website resmi Pemkab Lumajang [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id) dan pada website pemerintah pusat di Rubrik Nusantara [www.infopublik.id](http://www.infopublik.id). Upaya tersebut dilakukan, agar dapat mengomunikasikan program atau kebijakan publik secara cepat, tepat, akurat dan relevan agar mudah dipahami, serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan.

### **4. FOTOMATIS (FOTO PRODUK DAN PROMOSI GRATIS)**

Penyebaran virus corona yang cepat membuat semua orang menjadi was-was untuk keluar rumah dan bersentuhan dengan apapun sehingga masyarakat lebih memilih untuk berbelanja dari rumah melalui media online guna menghindari kontak langsung dengan lingkungan luar rumahnya. Hal ini yang membuat penjualan produk melalui media online belakangan ini naik secara signifikan. Berbeda dengan belanja langsung di toko, dalam belanja online pada online shop pembeli tidak bertemu. Tapi mereka bebas memilih beraneka macam produk melalui tampilan atau contoh gambar. Sehingga saat ini banyak pelaku bisnis online dan UMKM yang berlomba-lomba untuk menampilkan gambar terbaik dari produknya dengan harapan menarik

minat calon pembeli. Sebagian dari mereka bahkan rela mengeluarkan dana ekstra yang tidak sedikit untuk menyewa fotografer handal guna menghasilkan gambar yang menarik karena dalam bisnis online gambar mengambil peran penting dalam laku tidaknya sebuah produk terutama produk yang baru diluncurkan di pasar.

Namun masalah baru muncul bagi pebisnis pemula atau UMKM yang baru saja menggeluti bisnis online yang rata-rata memulai bisnis dengan modal terbatas. sehingga tentu berat buat mereka untuk menyewa fotografer profesional. tidak heran jika kondisi ini membuat UMKM sering kali kalah bersaing bukan karena kualitas produk mereka tapi hanya karena foto produk yang di tampilkan tidak menarik. FOTOMATIS yang merupakan singkatan dari Foto Produk dan Promosi Gratis, adalah sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat pebisnis online terutama UMKM. melalui program ini Diskominfo akan membantu UMKM di Kabupaten Lumajang untuk menghasilkan foto produk terbaik yang akan mereka gunakan sebagai display promosi mereka di media online. Sehingga UMKM dapat fokus kepada perbaikan mutu dan kualitas produk serta strategi penjualan tanpa harus bersusah payah memikirkan design ataupun display foto produk mereka lagi.

## 5. SULAM ALIS (SUARA LUMAJANG ANDALAN INFORMASI DAN KESENANGAN/HIBURAN)

- Membuat inovasi menuju radio format digital diantaranya, upgrade dan streaming LPPL Radio Suara Lumajang, gencar mempromosikan link. Download aplikasi media online dan whatsapp.
- Membuat group facebook penggemar Suara Lumajang untuk interaksi pengguna radio di media sosial, menampung aspirasi penggemar untuk saran dan perbaikan kualitas saran, media untuk promosi program-program Radio Suara Lumajang 104.1.
- Merubah format talkshow yang awalnya siaran offline menjadi talkshow live facebook radio.
- Membuat segmen-segmen program acara SPADA (Spesial Anak Muda) menjadi lebih bervariasi diantaranya, dengan segmen khusus mengulas Indie Lumajang. Untuk sarana promosi lagu-lagu band atau single musisi asli Lumajang.
- NEW MMBK : Format mengundang group band Indie Lumajang untuk talkshow, serta tampil live di studio.
- MMBK Goes To Cafe : Siaran langsung radio dari cafe untuk mengulas umum dan menyiarkan live di facebook radio, tampil live musik di cafe.
- Pemutaran sandiwara radio " TUTUR TINULAR" di jam 23.00 WIB untuk memberikan hiburan bagi Satgas Keamanan Desa (SKD) yang sedang piket/ ronda di wilayah.

## 6. GUINEMA

*Guided News Maker* bisa disebut GUINEMA merupakan inovasi untuk membuat berita terpandu. Aplikasi ini diperuntukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang hingga kini masih lemah dalam hal penulisan berita dan berakibat minimnya pasokan berita atau informasi dari KIM. Tujuan aksi perubahan ini dirumuskan menjadi tiga tujuan yaitu: Tujuan Jangka Pendek, Tujuan Jangka Menengah, dan Tujuan Jangka Panjang. KIM adalah kelompok masyarakat yang sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan jurnalistik atau tulis menulis berita, oleh karena itu perlu sebuah terobosan inovasi untuk mengatasi problem tersebut. Inovasi yang diajukan berbentuk aplikasi yang dinamakan "Guided News Maker" (Guinema) atau pembuat berita terpandu. Dengan aplikasi ini, masalah ketidakmampuan KIM dalam menulis berita akan teratasi. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, KIM akan bisa membuat berita dengan mudah. aplikasi "Guided News Maker" ini sebagai terobosan inovasi dengan berbagai alasan. Aplikasi ini akan sangat

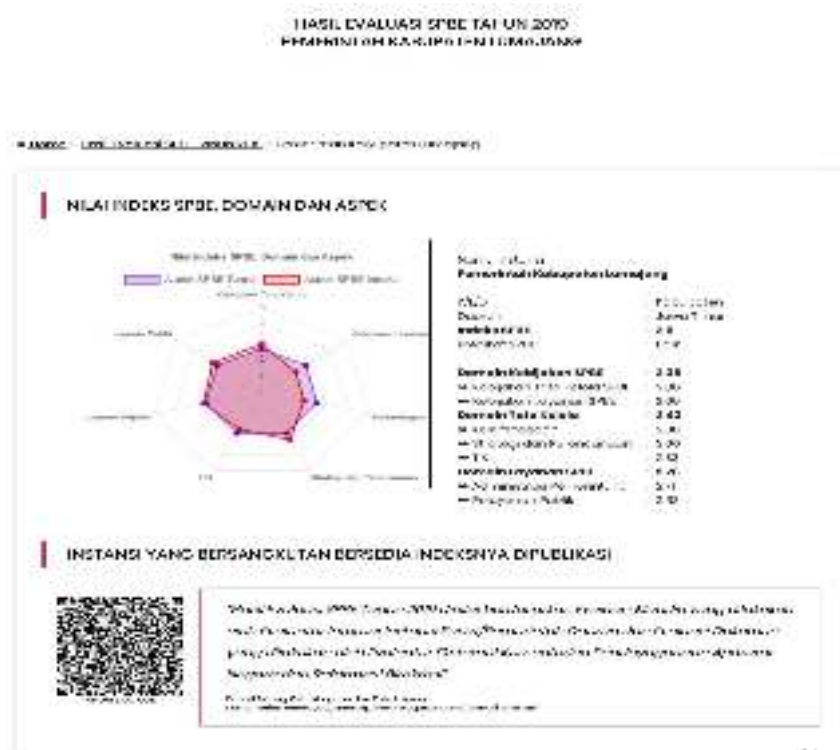
membantu para anggota KIM untuk menulis berita bahkan tanpa kemampuan jurnalistik sekalipun.

Aplikasi Guinema ini adalah aplikasi dimana pengguna dipandu untuk membuat berita. Dalam aplikasi ini terdapat kerangka berita yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna dengan cara menjawab yang sudah dicontohkan serta terdapat icon untuk menambahkan foto sehingga memberikan kesan yang pas. Setelah selesai, maka pengguna akan menerima berita yang sudah jadi dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu melalui aplikasi Guinema tersebut. Aplikasi Guinema log in melalui email masing-masing, setelah selesai membuat berita maka akan ada pemberitahuan dari email yang berupa berita sudah tersusun rapi.

Aplikasi ini akan memudahkan KIM dalam memproduksi sebanyak-banyaknya informasi tanpa harus merasa kesulitan dalam menyusun berita. Karena banyaknya keluhan yang dihadapi oleh KIM saat membuat berita. Dengan inovasi berupa aplikasi Guided News Maker (GUINEMA), KIM yang awalnya kesulitan dalam membuat berita, kini mereka lebih bisa membuat berita yang bagus baik secara isi, organisasi paragraf, maupun tata bahasa.

**Prestasi yang dicapai :**

1. Indeks SPBE yang semula pada tahun 2019 mendapat Predikat baik dengan Nilai 2,60 (gambar 1) dan Pada Tahun 2020 meningkat nilainya dengan predikat Baik dengan nilai 3,20 (gambar 2)



Gambar 2. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2019  
 Gambar 3. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2020



## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Jumlah dana APBD dan DBHCHT serta Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020**

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	Rp. 994.140.932	Rp. 988.842.812	99,47
2	Tunjangan keluarga	Rp. 99.587.812	Rp. 97.997.342	98,40
3	Tunjangan jabatan	Rp. 131.435.000	Rp. 130.550.000	99,33
4	Tunjangan fungsional umum	Rp. 32.325.136	Rp. 23.455.200	72,56
6	Tunjangan beras	Rp. 37.916.100	Rp. 37.737.420	99,53

7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	Rp. 777.788	Rp. 726.702	93,43
8	Pembulatan gaji	Rp. 22.660	Rp. 14.805	65,34
9	Juran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	Rp. 8.264.190	Rp. 8.203.875	99,27
10	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Rp. 788.083.276	Rp. 774.155.297	98,23
11	Tunjangan uang makan	-	-	-
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	Rp. 2.092.552.894	Rp. 2.061.683.453	<b>98,52</b>

**BELANJA LANGSUNG**

<b>BIDANG</b>	<b>: SEKRETARIAT</b>			
<b>Program</b>	<b>: Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<i><b>Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran</b></i>	<b>893.706.500,00</b>	<b>834.841.640,00</b>	<b>93,41</b>	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
Belanja Pegawai	78.920.250,00	75.412.250,00	95,56	<u>Realisasi digunakan untuk:</u> - Honorarium pengadaan barang/jasa Rp. 16.478.250,00 - Honorarium pengurus barang Rp. 2.628.000,00 - Honorarium penerima hasil pekerjaan Rp. 1.200.000,00 - Honorarium pengguna anggaran 9.048.000,00 - Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 6.389.500,00 Honorarium bendahara : 6.456.000,00

				<p>Honorarium PPK-SKPD (verifikator) : 7.748.000,00</p> <p>Honorarium petugas pengelola sistem</p> <p>Akuntansi : 4.499.500,00</p> <p>- Uang lembur PNS Rp. 20.965.000,00</p>
- Belanja Barang & Jasa	814.786.250,00	759.429.390,00	93,21	<p><u>Realisasi digunakan untuk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja alat tulis kantor Rp. 49.990.000,00</li> <li>- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) Rp. 7.306.807,00</li> <li>- Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 5.400.000,00</li> <li>- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 13.171.000,00</li> <li>Belanja umbul-umbul/bendera 1.000.000,00</li> <li>- Belanja bahan makanan Rp. 5.718.000,00</li> <li>- Belanja telepon Rp. 12.791.856,00</li> <li>- Belanja Air Rp. 467.700,00</li> <li>- Belanja Listrik Rp. 161.137.538,00</li> <li>- Belanja paket/pengiriman Rp. 113.000,000</li> <li>- Belanja retribusi pelayanan persampahan Rp. 600.000,00</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja premi asuransi Kesehatan Rp. 43.066.885,00</li> <li>- Belanja premi asuransi ketenagakerjaan Rp. 3.425.408,00</li> <li>- Belanja cetak Rp. 16.331.800,00</li> <li>- Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan Rp. 8.809.135,00</li> <li>- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 2.681.750,00</li> <li>- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 58.400.000,00</li> <li>- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 186.080.511,00</li> <li>- Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 151.600.000,00</li> <li>- Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 31.338.000,00</li> </ul>
<b>Program</b>	<b>: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b><i>Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur</i></b>	<b><i>266.361.680,00</i></b>	<b><i>264.426.000,00</i></b>	<b><i>99,27</i></b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa, dan belanja modal</i>
- Belanja Barang & Jasa	10.197.000,00	9.975.000,00	97,82	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja meubelair Rp. 8.400.000,00



				- Belanja peralatan studio visual Rp. 600.000,00
				- Belanja peralatan studio video dan film Rp. 975.000,00
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	242.137.680,00	240.606.000,00	99,37	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>  - Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp. 10.900.000,00  - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 142.206.000,00  - Belanja modal alat pendingin Rp. 9.835.000,00  - Belanja modal home use Rp. 132.371.000,00  - Belanja modal personal komputer Rp. 19.950.000,00  - Belanja modal peralatan personal komputer Rp. 16.800.000,00  - Belanja modal peralatan jaringan Rp. 14.200.000,00  - Belanja modal peralatan studio visual Rp. 11.675.000,00  - Belanja modal alat komunikasi telephone Rp. 24.875.000,00  - Belanja modal bangunan dan gedung Rp.13.845.000,00
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>

<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>227.110.000</b>	<b>217.368.434</b>	<b>95,7 1</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
Belanja Pegawai	0	0	0	
Belanja Barang & Jasa	227.110.000	217.368.434	95,7 1	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja bahan bakar minyak/minyak Rp. 2.204.020,00</li> <li>- Belanja bahan bakar minyak dan pelumas Rp. 67.026.821,00</li> <li>- Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang Rp. 72.033.093,00</li> <li>- Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional Rp. 155.000,00</li> <li>- Belanja STNK kendaraan dinas/operasional Rp. 4.605.500,00</li> <li>- Belanja upah/ongkos tenaga kerja Rp. 19.000.000,00</li> <li>- Belanja pemeliharaan Alat-alat bantu Rp. 5.644.000,00</li> <li>- Belanja pemeliharaan alat pendingin Rp. 9.000.000,00</li> <li>- Belanja pemeliharaan home use Rp. 6.000.000,00</li> <li>- Belanja pemeliharaan komputer Rp. 31.700.000,00</li> </ul>
Belanja Modal	0	0	0	

<b>Program</b>		<b>: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP</b>	<b>4.108.400</b>	<b>4.022.375</b>	<b>97.91</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	1.782.000	1.706.000	95.73	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Uang lembur Rp. 1.706.000,00
- Belanja Barang & Jasa	2.326.400	2.316.375	99.57	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan Rp. 790.375,00 - Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 1.526.000,00
- Belanja Modal	0	0	0	
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>480.000</b>	<b>473.500</b>	<b>98,65</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
Belanja Pegawai	0	0	0	
- Belanja Barang & Jasa	480.000	473.500	98,65	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan Rp. 122.500,00 - Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 351.000,00
Belanja Modal	0	0	0	

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.163.800</b>	<b>98,80</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
Belanja Pegawai	0	0	0	-
Belanja Barang & Jasa	1.470.000	1.469.275	99,95	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan Rp. 634.800,00 - Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 1.529.000,00
Belanja Modal	0	0	0	
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
<b>Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>951.000</b>	<b>945.850</b>	<b>99,46</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
Belanja Pegawai	435.000	435.000	100	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Uang lembur Rp. 435.000,00
Belanja Barang & Jasa	1.500.000	1.340.000	89,33	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan Rp. 145.850,00- Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 365.000,00
Belanja Modal	0	0	0	
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan

<b>Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD</b>	<b>4.839.000</b>	<b>4.827.700</b>	<b>99,77</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
Belanja Pegawai	2.943.000	2.941.000	99,77	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Uang lembur Rp. 2.941.000,00
Belanja Barang & Jasa	1.896.000	1.886.700	99,51	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan Rp. 1.208.700,00 - Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 678.000,00
Belanja Modal	0	0	0	
<b>BIDANG</b>	<b>: HUMAS DAN KEMITRAAN MEDIA MASSA</b>			
<b>Program</b>	<b>: Pengelolaan Informasi dan Media Massa</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Kerjasama Informasi dengan Media Massa</b>	<b>1.646.977.600</b>	<b>1.551.734.800</b>	<b>94,22</b>	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
Belanja Pegawai	6.300.000	6.300.000	100	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 7.200.000,00
Belanja Barang & Jasa	1.638.877.600	1.554.534.800	94,24	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Belanja jasa kantor Rp. 1.477.790.000,00 - Belanja cetak dan penggandaan Rp. 0 - Belanja makanan dan minuman Rp. 34.582.800,00

				<p>- Belanja upah/ongkos tenaga kerja Rp.32.162.000,00</p> <p><i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i></p> <p><u>Realisasi Digunakan untuk:</u></p> <p>- Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 7.200.000,00</p> <p><u>Realisasi digunakan untuk :</u></p> <p>- Belanja jasa kantor Rp. 1.477.790.000,00</p> <p>- Belanja cetak dan penggandaan Rp. 0</p>
				<p>- Belanja makanan dan minuman Rp. 34.582.800,00</p>
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Penyelenggaraa n Kehumasan Daerah</b>	<b>553.308.000</b>	<b>506.405.69 7</b>	<b>91,52</b>	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
Belanja Pegawai	2.325.000	1.312.500	56,54	<p><u>Realisasi Digunakan untuk:</u></p> <p>- Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 1.312.500,00</p>
Belanja Barang & Jasa	531.374.000	485.484.19 7	91,36	<p><u>Realisasi digunakan untuk :</u></p> <p>- Belanja cinderamata Rp. 4.000.000,00</p> <p>- Belanja Bahan makanan Rp. 14.243.902,00</p> <p>- Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 13.582.339,00</p> <p>- Belanja dekorasi Rp. 2.000.000,00</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli Rp. 9.400.000,00</li> <li>- Belanja jasa pendukung kegiatan Rp. 3.150.000,00</li> <li>- Belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan Rp. 0</li> <li>- Belanja jasa perizinan penyelenggaraan penyiaran LPPL Rp. 5.673.256,00</li> <li>- Belanja barang dan/atau uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Rp. 10.800.000,00</li> <li>- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 10.260.000,00</li> <li>- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 15.206.700,00</li> <li>- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 40.900.000,00</li> <li>- Belanja upah/ongkos tenaga kerja harian Rp. 67.230.000,00</li> <li>- Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 219.100.000,00</li> <li>- Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 27.039.000,00</li> <li>- Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM Rp. 27.499.000,00</li> <li>- Belanja pemeliharaan bangunan menara Rp. 15.400.000,00</li> </ul>
- Belanja Modal	19.609.000	19.609.000	100	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja modal home use Rp. 5.110.000,00</li> <li>- Belanja modal personal komputer Rp. 12.599.000,00</li> <li>- Belanja modal peralatan jaringan Rp. 2.000.000,00</li> </ul>
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Pengelolaan Media Publik</b>	<b>793.203.000</b>	<b>732.108.107</b>	<b>96.43</b>	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	1.950.000	1.950.000	100	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 1.950.000,00</li> </ul>
- Belanja Barang & Jasa	514.563.000	469.634.000	91,27	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja karangan bunga/bunga tabur Rp. 30.000.000,00</li> <li>- Belanja kawar/faksimili/internet tabur Rp. 8.612.107,00</li> <li>- Belanja dekorasi Rp. 19.800.000,00</li> <li>- Belanja jasa promosi/publikasi/advertising Rp. 90.110.000,00</li> <li>- Belanja jasa pendukung kegiatan Rp. 3.000.000,00</li> <li>- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 900.000,00</li> <li>- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 44.450.000,00</li> <li>- Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 208.400.000,00</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja tambahan upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 26.640.000,00</li> <li>- Belanja home use Rp. 750.000,00</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pemeliharaan peralatan studio video dan film Rp. 40.000.000,00</li> </ul>

<b>BIDANG</b>	<b>: INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			
<b>Program</b>	<b>: Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik</b>	<b>145.262.500</b>	<b>132.662.531</b>	<b>91,33</b>	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	4.725.000	3.450.000	73,02	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 3.450.500,00</li> </ul>
- Belanja Barang & Jasa	140.537.500	129.212.531	91,94	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja spanduk/baliho/banner habis Rp. 180.500,00</li> <li>- Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 1.039.031,00</li> <li>- Belanja dekorasi Rp. 545.000,00</li> <li>- Belanja penggantian transport Rp. 27.100.000,00</li> <li>- Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli Rp. 2.700.000,00</li> <li>- Belanja jasa pendukung kegiatan Rp. 600.000</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja cetak dan penggandaan Rp. 5.750.000,00</li> <li>- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Rp. 6.000.000,00</li> <li>- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 11.910.000,00</li> <li>- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 16.200.000,00</li> <li>- Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 42.000.000,00</li> <li>- Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 6.688.000,00</li> <li>- Belanja hadiah uang tunai Rp. 6.500.000,00</li> <li>- Belanja hadiah barang Rp. 2.000.000,00</li> </ul>
- Belanja Modal	0	0	0	
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b><i>Penyelenggaraan Informasi Publik</i></b>	<b>129.680.000</b>	<b>107.454.859</b>	<b>82,86</b>	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	4.420.000	4.420.000	100	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 165.000,00</li> </ul>
- Belanja Barang & Jasa	127.970.000	107.289.859	83,84	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 1.320.803,00</li> <li>- Belanja dekorasi Rp. 800.000,00</li> <li>- Belanja penggantian transport Rp. 2.500.000,00</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli Rp. 15.350.000,00</li> <li>- Belanja jasa pendukung kegiatan Rp. 1.250.000,00</li> <li>- Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp. 2.632.000,00</li> <li>- Belanja sewa rumah/gedung/parkir/tempat Rp. 4.020.000,00</li> <li>- Belanja sewa penginapan Rp. 8.460.000,00</li> <li>- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.020.000,00</li> <li>- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 16.100.000,00</li> <li>- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 7.452.000,00</li> <li>- Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 36.900.000,00</li> <li>- Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 4.605.000,00</li> </ul>
Belanja Modal	0	0	0	
<b>Program : Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>				
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
<b>Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan</b>	<b>693.606.250</b>	<b>638.325.000</b>	<b>92,03</b>	

- Belanja Pegawai	0	0	0	
- Belanja Barang & Jasa	693.606.250	638.325.000	92,03	<p><u>Realisasi digunakan untuk :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek Rp. 75.200.000,00</li> <li>- Belanja dekorasi Rp. 1.750.000,00</li> <li>- Belanja jasa promosi/publikasi/advertising Rp. 357.375.000,00</li> <li>- Belanja penggantian transport Rp. 96.550.000,00</li> <li>- Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli Rp. 17.625.000,00</li> <li>- Belanja jasa pendukung kegiatan Rp. 5.550.000,00</li> <li>- Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan Rp. 9.500.000,00</li> <li>- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Rp. 15.000.000,00</li> <li>- Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu Rp. 46.125.000,00</li> </ul>
- Belanja Modal	0	0	0	
<b>Program : Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah</b>				
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian</b>	<b>42.900.000</b>	<b>36.980.901</b>	<b>86,20</b>	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	1.200.000	1.200.000	100	<p><u>Realisasi Digunakan untuk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 1.200.000,00</li> </ul>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

- Belanja Barang & Jasa	140.537.500	129.212.531	91,94	<p><u>Realisasi digunakan untuk</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja telepon Rp. 4.480.901,00</li> <li>- Belanja sewa rumah/gedung/gudang/par kir/tempat Rp. 18.000.000,00</li> <li>- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.100.000,00</li> <li>- Belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan Rp. 0</li> <li>- Belanja pemeliharaan bangunan menara telekomunikasi Rp. 11.000.000,00</li> </ul>
- Belanja Modal	0	0	0	

<b>BIDANG</b>	<b>: APLIKASI INFORMATIKA</b>			
<b>Program</b>	<b>: Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b><i>Pengelolaan dan Pengembangan Informatika</i></b>	<b>805.400.200</b>	<b>759.389.551</b>	<b>94,29</b>	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal</i>
- Belanja Pegawai	6.336.000	6.336.000	100	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 6.336.000,00
- Belanja Barang & Jasa	558.656.000	521.828.411	93,41	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 431.632.411,00 - Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 44.400.000,00 - Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 16.992.000,00 - Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan Rp. 46.804.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.808.200	70.969.000	96,15	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Belanja modal home use Rp. 1.540.000,00 - Belanja modal personal komputer Rp. 41.800.000,00 - Belanja modal peralatan personal komputer Rp. 1.881.000,00 - Belanja modal peralatan jaringan Rp. 25.748.000,00 - Belanja modal aset tak berwujud software komputer Rp. 60.933.000,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.600.000	99.323.140	98,73	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Belanja modal jaringan internet Rp. 99.323.140

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
<b>Pemberdayaan Informatika</b>	<b>379.657.000</b>	<b>363.774.080</b>	<b>95,82</b>	
Belanja Pegawai	0	0	0	-
Belanja Barang & Jasa	379.657.000	363.774.080	95,82	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Belanja penggantian transport Rp. 2.400.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 14.896.080,00 - Belanja konsultasi IT Rp. 266.750.000,00 - Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 68.400.000,00 - Belanja tambahan upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 11.328.000,00
Belanja Modal	0	0	0	-
<b>Program : Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>				
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
<b>Layanan Data dan Statistik</b>	<b>259.724.000</b>	<b>256.926.600</b>	<b>98,92</b>	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	0	0	0	-
- Belanja Barang & Jasa	180.725.000	180.175.000	99,70	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 191.400.000,00 - Belanja cetak Rp. 21.260.000,00 - Belanja modal personal komputer Rp. 11.935.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 2.667.600,00 - Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 29.664.000,00

				- Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 5.664.000,00
- Belanja Modal	0	0	0	

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai Rp. 9.108.018.024,00 atau 94,92% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.645.514.878,00 ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efektif dan efisien. Faktor utama penyebab beberapa permasalahan dalam merealisasikan anggaran adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait pandemi *covid-19* sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan. Selanjutnya Faktor *Refocusing* anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pandemi *covid-19* sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkaibat terhadap upaya pencapaian kinerja Program.

### C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Hasil Penilaian Capaian Kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah *blank spot* teknologi informasi komunikasi (TIK) dan *Blank Spot* pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
6. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika
7. *Refocusing*/ Efisiensi anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pandemi *covid-19* sehingga banyak berpengaruh terhadap



anggaran yang tersedia dan berkitab terhadap upaya pencapaian kinerja.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang pada tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website.
2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Fiber Optik dan hotspot di wilayah publik (lingkup Kota) serta sekitar kantor Kecamatan dan Desa.
3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Lumajang dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio, Tabloid, dan website).
4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di OPD.
5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/ pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan.
7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
8. Menyediakan ketersediaan kebutuhan data yang mutakhir yang bisa diakses oleh Masyarakat.

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2020 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 17 Februari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG



**YOGA PRATOMO, S.STP**  
Pembina Tk I  
NIP. 19780910 199802 1 001

# **LAMPIRAN DATA PENDUKUNG**

Lampiran 1 : Data Pendukung atas sasaran meningkatnya Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu.

**DATA PD PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK TERPADU**  
JUMLAH PD PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK TERPADU

**Jumlah : 52 PD**

NO	PD	Sistem Elektronik
1	Sekretariat DPRD	Website ( <a href="http://dprd.lumajangkab.go.id">dprd.lumajangkab.go.id</a> )
2	Inspektorat Daerah	Website ( <a href="http://inspektorat.lumajangkab.go.id">inspektorat.lumajangkab.go.id</a> )
3	Sekretariat Daerah	<a href="http://jdih.lumajangkab.go.id">jdih.lumajangkab.go.id</a>
		<a href="http://sakup.lumajangkab.go.id">sakip.lumajangkab.go.id</a>
4	Badan Kepegawaian Daerah	Website BKD ( <a href="http://bkd.lumajangkab.go.id">bkd.lumajangkab.go.id</a> )
		<a href="http://simak.lumajangkab.go.id">simak.lumajangkab.go.id</a>
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<a href="http://bakesbangpol.lumajangkab.go.id">bakesbangpol.lumajangkab.go.id</a>
6	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	e-BPHTB ( <a href="https://bprd.lumajangkab.go.id/bphtb/">https://bprd.lumajangkab.go.id/bphtb/</a> )
		e-SPTPD ( <a href="http://bprd.lumajangkab.go.id:2020/">http://bprd.lumajangkab.go.id:2020/</a> )
		e-Pajak Pasir ( <a href="http://bprd.lumajangkab.go.id:3030/e-pasir/">http://bprd.lumajangkab.go.id:3030/e-pasir/</a> )
		e-Reklame ( <a href="https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pajakreklame/">https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pajakreklame/</a> )
		Cek Pembayaran Baku Desa ( <a href="https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pbb-p2/web/Cek_op/cekdesa.php">https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pbb-p2/web/Cek_op/cekdesa.php</a> )
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<a href="http://bpbd.lumajangkab.go.id">bpbd.lumajangkab.go.id</a>
8	Badan Pengelola Keuangan Daerah	<a href="http://bpkd.lumajangkab.go.id">bpkd.lumajangkab.go.id</a>
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<a href="http://bappeda.lumajangkab.go.id">bappeda.lumajangkab.go.id</a>
		SIMTARU
10	Diskominfo	<a href="http://diskominfo.lumajangkab.go.id">diskominfo.lumajangkab.go.id</a>
		Website : <a href="http://lumajangkab.go.id">lumajangkab.go.id</a>
		<a href="http://pengaduan.lumajangkab.go.id">pengaduan.lumajangkab.go.id</a>
		Portal Berita
		<a href="http://e-gallery.lumajang.go.id">e-gallery.lumajang.go.id</a>
		<a href="http://simesdsos.lumajang.go.id">simesdsos.lumajang.go.id</a>
		PPID
		<a href="http://data.lumajangkab.go.id">data.lumajangkab.go.id</a>
		MRTG
		SMS Gateway
		Email menggunakan zimbra: <a href="mailto:mail.lumajangkab.go.id">mail.lumajangkab.go.id</a>
		Website Diskominfo ( <a href="http://diskominfo.lumajangkab.go.id">diskominfo.lumajangkab.go.id</a> )
<a href="http://sakip.lumajangkab.go.id">sakip.lumajangkab.go.id</a>		
<a href="http://e-office.lumajangkab.go.id">e-office.lumajangkab.go.id</a>		
11	Disparbud	<a href="http://disparbud.lumajangkab.go.id">disparbud.lumajangkab.go.id</a>
12	Disnaker	<a href="http://disnaker.lumajangkab.go.id">disnaker.lumajangkab.go.id</a>
13	Dispendukcapil	<a href="http://dispenduk.lumajangkab.go.id">dispenduk.lumajangkab.go.id</a>
14	Dinsos	<a href="http://dinsos.lumajangkab.go.id">dinsos.lumajangkab.go.id</a>
15	DPKP	<a href="http://dpkp.lumajangkab.go.id">dpkp.lumajangkab.go.id</a>
16	Dispora	<a href="http://dispora.lumajangkab.go.id">dispora.lumajangkab.go.id</a>
17	Dinkes	<a href="http://dinkes.lumajangkab.go.id">dinkes.lumajangkab.go.id</a>

18	DPMPTSP	dpmptsp.lumajangkab.go.id
19	Disdaldukbpp	dppkbpp.lumajangkab.go.id
20	Satpol PP	satpolpp.lumajangkab.go.id
21	Dindag	dindag.lumajangkab.go.id
22	DPMD	dpmdesa.lumajangkab.go.id
		SID (Sistem Informasi Desa)
23	Dishub	dishub.lumajangkab.go.id
		flaj.lumajangkab.go.id
24	Dinas Perikanan	disikan.lumajangkab.go.id
25	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	dinkopum.lumajangkab.go.id
26	Disarpus	disarpus.lumajangkab.go.id
27	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.lumajangkab.go.id
28	Dinas Ketahanan Pangan	dkp.lumajangkab.go.id
29	Dinas Pertanian	pertanian.lumajangkab.go.id
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	dputr.lumajangkab.go.id
31	Dinas Pendidikan	dindik.lumajangkab.go.id
32	Website Kec. Candipuro	candipuro.lumajangkab.go.id
33	Website Kec. Gucialit	gucialit.lumajangkab.go.id
34	Website Kec. Jatiroto	jatiroto.lumajangkab.go.id
35	Website Kec. Kedungjajang	kedungjajang.lumajangkab.go.id
36	Website Kec. Klakah	klakah.lumajangkab.go.id
37	Website Kec. Kunir	kunir.lumajangkab.go.id
38	Website Kec. Lumajang	lumajang.lumajangkab.go.id
39	Website Kec. Padang	padang.lumajangkab.go.id
40	Website Kec. Pasirian	pasirian.lumajangkab.go.id
41	Website Kec. Pasrujambe	pasrujambe.lumajangkab.go.id
42	Website Kec. Pronojiwo	pronojiwo.lumajangkab.go.id
43	Website Kec. Randuagung	randuagung.lumajangkab.go.id
44	Website Kec. Ranuyoso	ranuyoso.lumajangkab.go.id
45	Website Kec. Rowokangkung	rowokangkung.lumajangkab.go.id
46	Website Kec. Senduro	senduro.lumajangkab.go.id
47	Website Kec. Sukodoono	sukodono.lumajangkab.go.id
48	Website Kec. Sumpersuko	sumpersuko.lumajangkab.go.id
49	Website Kec. Tekung	tekung.lumajangkab.go.id
50	Website Kec. Tempeh	tempeh.lumajangkab.go.id
51	Website Kec. Tempursari	tempursari.lumajangkab.go.id
52	Website Kec. Yosowilangun	yosowilangun.lumajangkab.go.id

Lampiran 2 : Data Pendukung atas sasaran Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

### DATA BADAN PUBLIK YANG MENERAPKAN STANDAR LAYANAN PUBLIK

NO	BADAN PUBLIK	ALAMAT WEBSITE	SK PENUNJUKAN PPID
1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/16">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/16</a>	1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
2	Bagian Administrasi Pemerintahan	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/9">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/9</a>	
3	Bagian Administrasi Perekonomian	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/12">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/12</a>	
4	Bagian Hukum	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/10">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/10</a>	
5	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/76">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/76</a>	
6	Bagian Organisasi	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/15">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/15</a>	
7	Bagian Rumah Tangga dan Protokol	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/11">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/11</a>	
8	Bagian Umum	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/17">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/17</a>	
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<a href="https://disarpus.lumajangkab.go.id/">https://disarpus.lumajangkab.go.id/</a>	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<a href="http://dputr.lumajangkab.go.id/">http://dputr.lumajangkab.go.id/</a>	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<a href="https://dispenduk.lumajangkab.go.id/">https://dispenduk.lumajangkab.go.id/</a>	
12	Dinas Kesehatan	<a href="https://dinkes.lumajangkab.go.id/">https://dinkes.lumajangkab.go.id/</a>	
13	Dinas Ketahanan Pangan	<a href="https://dkp.lumajangkab.go.id/">https://dkp.lumajangkab.go.id/</a>	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	<a href="https://diskominfo.lumajangkab.go.id/">https://diskominfo.lumajangkab.go.id/</a>	
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	<a href="https://dinkopum.lumajangkab.go.id/">https://dinkopum.lumajangkab.go.id/</a>	
16	Dinas Lingkungan Hidup	<a href="https://dlh.lumajangkab.go.id/">https://dlh.lumajangkab.go.id/</a>	
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<a href="https://disparbud.lumajangkab.go.id/">https://disparbud.lumajangkab.go.id/</a>	
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<a href="https://dpmdesa.lumajangkab.go.id/">https://dpmdesa.lumajangkab.go.id/</a>	
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	<a href="https://dispورا.lumajangkab.go.id/">https://dispورا.lumajangkab.go.id/</a>	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<a href="https://dpmptsp.lumajangkab.go.id/">https://dpmptsp.lumajangkab.go.id/</a>	
21	Dinas Pendidikan	<a href="http://dindik.lumajangkab.go.id/dindik/">http://dindik.lumajangkab.go.id/dindik/</a>	
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan	<a href="https://dppkbbpp.lumajangkab.go.id/#">https://dppkbbpp.lumajangkab.go.id/#</a>	
23	Dinas Perdagangan	<a href="https://dindag.lumajangkab.go.id/">https://dindag.lumajangkab.go.id/</a>	
24	Dinas Perhubungan	<a href="https://dishub.lumajangkab.go.id/">https://dishub.lumajangkab.go.id/</a>	
25	Dinas Perikanan	<a href="https://diskan.lumajangkab.go.id/">https://diskan.lumajangkab.go.id/</a>	
26	Dinas Pertanian	<a href="https://pertanian.lumajangkab.go.id/">https://pertanian.lumajangkab.go.id/</a>	
27	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<a href="https://dpkp.lumajangkab.go.id/">https://dpkp.lumajangkab.go.id/</a>	
28	Dinas Sosial	<a href="https://dinsos.lumajangkab.go.id/">https://dinsos.lumajangkab.go.id/</a>	
29	Dinas Tenaga Kerja	<a href="https://disnaker.lumajangkab.go.id/">https://disnaker.lumajangkab.go.id/</a>	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	<a href="https://satpolpp.lumajangkab.go.id/">https://satpolpp.lumajangkab.go.id/</a>	
31	Badan Kepegawaian Daerah	<a href="https://bkd.lumajangkab.go.id/">https://bkd.lumajangkab.go.id/</a>	
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<a href="https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id/">https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id/</a>	
33	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	<a href="https://bprd.lumajangkab.go.id/">https://bprd.lumajangkab.go.id/</a>	
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<a href="https://bpbd.lumajangkab.go.id/">https://bpbd.lumajangkab.go.id/</a>	
35	Badan Pengelola Keuangan Daerah	<a href="http://bpkd.lumajangkab.go.id/">http://bpkd.lumajangkab.go.id/</a>	
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<a href="https://bappeda.lumajangkab.go.id/">https://bappeda.lumajangkab.go.id/</a>	
37	Inspektorat	<a href="https://inspektorat.lumajangkab.go.id/">https://inspektorat.lumajangkab.go.id/</a>	
38	RSUD Haryoto	<a href="https://rsudharyoto.lumajangkab.go.id/">https://rsudharyoto.lumajangkab.go.id/</a>	
39	RSUD Pasirian	<a href="https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/">https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/</a>	

40	Sekretariat DPRD	<a href="https://dprd.lumajangkab.go.id/">https://dprd.lumajangkab.go.id/</a>
41	PD BPR Bank Pasar	<a href="https://www.banklumajang.com/">https://www.banklumajang.com/</a>
42	PD Semeru	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/45">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/45</a>
43	PDAM	<a href="https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/43">https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/43</a>
44	Kecamatan Candipuro	<a href="https://candipuro.lumajangkab.go.id/">https://candipuro.lumajangkab.go.id/</a>
45	Kecamatan Gucialit	<a href="https://gucialit.lumajangkab.go.id/">https://gucialit.lumajangkab.go.id/</a>
46	Kecamatan Jatiroto	<a href="https://jatiroto.lumajangkab.go.id/">https://jatiroto.lumajangkab.go.id/</a>
47	Kecamatan Kedungjajang	<a href="https://kedungjajang.lumajangkab.go.id/">https://kedungjajang.lumajangkab.go.id/</a>
48	Kecamatan Klakah	<a href="https://klakah.lumajangkab.go.id/">https://klakah.lumajangkab.go.id/</a>
49	Kecamatan Kunir	<a href="https://kunir.lumajangkab.go.id/">https://kunir.lumajangkab.go.id/</a>
50	Kecamatan Lumajang	<a href="https://lumajang.lumajangkab.go.id/">https://lumajang.lumajangkab.go.id/</a>
51	Kecamatan Padang	<a href="https://padang.lumajangkab.go.id/">https://padang.lumajangkab.go.id/</a>
52	Kecamatan Pasirian	<a href="https://pasirian.lumajangkab.go.id/">https://pasirian.lumajangkab.go.id/</a>
53	Kecamatan Pasrujambe	<a href="https://pasrujambe.lumajangkab.go.id/">https://pasrujambe.lumajangkab.go.id/</a>
54	Kecamatan Pronojiwo	<a href="https://pronojiwo.lumajangkab.go.id/">https://pronojiwo.lumajangkab.go.id/</a>
55	Kecamatan Randuagung	<a href="https://randuagung.lumajangkab.go.id/">https://randuagung.lumajangkab.go.id/</a>
56	Kecamatan Ranuyoso	<a href="https://ranuyoso.lumajangkab.go.id/">https://ranuyoso.lumajangkab.go.id/</a>
57	Kecamatan Rowokangkung	<a href="https://rowokangkung.lumajangkab.go.id/">https://rowokangkung.lumajangkab.go.id/</a>
58	Kecamatan Senduro	<a href="https://senduro.lumajangkab.go.id/">https://senduro.lumajangkab.go.id/</a>
59	Kecamatan Sukodono	<a href="https://sukodono.lumajangkab.go.id/">https://sukodono.lumajangkab.go.id/</a>
60	Kecamatan Sumbersuko	<a href="https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/">https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/</a>
61	Kecamatan Tekung	<a href="https://tekung.lumajangkab.go.id/">https://tekung.lumajangkab.go.id/</a>
62	Kecamatan Tempeh	<a href="https://tempeh.lumajangkab.go.id/">https://tempeh.lumajangkab.go.id/</a>
63	Kecamatan Tempursari	<a href="https://tempursari.lumajangkab.go.id/">https://tempursari.lumajangkab.go.id/</a>
64	Kecamatan Yosowilangun	<a href="https://yosowilangun.lumajangkab.go.id/">https://yosowilangun.lumajangkab.go.id/</a>
65	Kelurahan Citrodiwangsan	<a href="https://citrodiwangsan.lumajangkab.go.id">https://citrodiwangsan.lumajangkab.go.id</a>
66	Kelurahan Ditrotunan	<a href="https://ditrotunan.lumajangkab.go.id">https://ditrotunan.lumajangkab.go.id</a>
67	Kelurahan Jogotrunan	<a href="https://jogotrunan.lumajangkab.go.id">https://jogotrunan.lumajangkab.go.id</a>
68	Kelurahan Jogoyudan	<a href="https://jogoyudan.lumajangkab.go.id">https://jogoyudan.lumajangkab.go.id</a>
69	Kelurahan Kepuharjo	<a href="https://kepuharjo.lumajangkab.go.id">https://kepuharjo.lumajangkab.go.id</a>
70	Kelurahan Rogotrunan	<a href="https://rogotrunan.lumajangkab.go.id">https://rogotrunan.lumajangkab.go.id</a>
71	Kelurahan Tompokersan	<a href="https://tompokersan.lumajangkab.go.id">https://tompokersan.lumajangkab.go.id</a>

Lampiran 3 : Data Pendukung atas sasaran Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

**REKAPITULASI UPDATE INFORMASI LAYANAN PUBLIK SECARA BERKALA TAHUN 2020**

No	PD	Informasi Berkala	Informasi Serta Merta	Informasi Setiap Saat
1	Sekretariat DPRD			
2	Inspektorat	15		
3	BKD	7		1
4	Bakesbangpol	15	1	1
5	BPRD			
6	BPBD			
7	BPKD	17	3	1
8	Bappeda	12		3
9	Dinas Kearsipan & Perpustakaan			
10	Dinas PUTR	7		
11	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	12		20
12	Dinas Kesehatan	17		
13	Dinas Ketahanan Pangan	16		1
14	Dinas Kominfo	24	12	
15	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	13		4
16	Dinas Lingkungan Hidup	33		
17	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	18		
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	15	1	2
19	Dinas Pemuda & Olah Raga	57		
20	DPMPTSP	27		
21	Dinas Pendidikan	16		1
22	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & PP	23		6
23	Dinas Perdagangan			
24	Dinas Perhubungan	27	3	
25	Dinas Perikanan	11	11	
26	Dinas Pertanian	3		
27	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	26	3	2
28	Dinas Sosial	11		
29	Dinas Tenaga Kerja			
30	Satpol PP	21		3
31	Bagian Adm. Perekonomian	2	1	
32	Bagian Adm. Kesra	10	4	
33	Bagian Adm. Pemerintahan	44		
34	Bagian Hukum		1	
35	Bagian LPBJ			
36	Bagian Organisasi	17	26	
37	Bagian RTP	8		
38	Bagian Umum	8		
39	Kecamatan Candipuro			
40	Kecamatan Gucialit	9	2	1
41	Kecamatan Jatiroto	10		
42	Kecamatan Kedungjajang	3	1	4
43	Kecamatan Klakah	25		1
44	Kecamatan Kunir	10		3
45	Kecamatan Lumajang	21		7
46	Kecamatan Padang	9		1
47	Kecamatan Pasirian	15		
48	Kecamatan Pasrujambe	24	1	1



49	Kecamatan Pronojiwo			
50	Kecamatan Randuagung			
51	Kecamatan Ranuyoso	29		3
52	Kecamatan Rowokangkung	23	1	1
53	Kecamatan Senduro			
54	Kecamatan Sukodono	23	1	
55	Kecamatan Sumbersuko	38	1	2
56	Kecamatan Tekung	5		1
57	Kecamatan Tempeh	12	1	1
58	Kecamatan Tempursari	3	2	1
59	Kecamatan Yosowilangun	32		
60	RSUD Pasirian	8	5	
61	RSUD dr. Haryoto	5	2	1
62	PD. BPR Bank Pasar	11		
63	PD. SEMERU			
64	PDAM	18	5	
65	Kelurahan Citrodiwangsan			
66	Kelurahan Ditotrunan			
67	Kelurahan Jogotrunan	14	1	
68	Kelurahan Jogoyudan			
69	Kelurahan Kepuharjo	2		
70	Kelurahan Rogotrunan	15		4
71	Kelurahan Tompokersan	5		
<b>TOTAL</b>		<b>901</b>	<b>89</b>	<b>77</b>
<b>Persentase</b>		<b>84%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>

**REKAPITULASI UPDATE INFORMASI LAYANAN PUBLIK SECARA BERKALA (DALAM BULAN)  
SELAMA TAHUN 2020**

Bulan	Informasi Berkala	Informasi Serta Merta	Informasi Setiap Saat
Januari	36	4	4
Februari	33	3	1
Maret	46	15	3
April	17	14	6
Mei	138	5	8
Juni	518	42	52
Juli	105	2	2
Agustus	3	0	1
September	0	1	0
Oktober	3	3	0
November	0	0	0
Desember	2	0	0
<b>Total</b>	<b>901</b>	<b>89</b>	<b>77</b>

Lampiran 4 : Data Pendukung atas sasaran Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

